

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Gerakan pemberdayaan muncul sebagai akibat dari adanya paradigma baru pembangunan. Paradigma lama pembangunan memandang manusia (masyarakat) sebagai objek dari kegiatan pembangunan, kini bergeser menjadi pembangunan yang berpusat pada manusia (masyarakat). Pergeseran paradigma tersebut berimplikasi pada masyarakat yang dituntut untuk mampu berperan serta dalam menentukan arah kehidupannya sendiri pada wadah kebijakan pemerintah. Hal tersebut disebut sebagai paradigma pemberdayaan atau paradigma pembangunan manusia, yaitu pembangunan yang berpusat pada rakyat dan merupakan proses pembangunan yang mendorong prakarsa masyarakat berakar dari bawah (Gaulet dalam Alfitri, 2011:21). Menurut Robert yang dikutip oleh Kartasasmita (1997:10) dalam Alfitri (2011:22) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, yang mencerminkan paradigma baru pembangunan yakni berpusat pada masyarakat (*people centered*) juga bersifat partisipatif (*participatory*), memberdayakan (*empowering*), dan berkelanjutan (*sustainable*).

Pemberdayaan masyarakat diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat ke-12. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya

melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Menurut undang-undang tersebut diketahui bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Kaitannya dengan pembangunan ekonomi maka masyarakat dituntut untuk mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dengan dukungan dari pemerintah untuk menumbuhkan suatu perekonomian.

Peran pemerintah sangat penting guna merumuskan kebijakan dan program yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut sangat dibutuhkan mengingat wilayah Indonesia yang luas dan masyarakatnya yang majemuk. Pemerintah daerah dinilai lebih mampu memahami potensi dan kemampuan daerahnya masing-masing, sehingga diharapkan dapat mengatur, mengisi dan menentukan arah pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kemampuan tiap-tiap daerah. Pada hakikatnya, otonomi meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari rakyat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh rakyat (Sumaryadi, 2005: 87). Oleh karena itu, ide dan partisipasi dari masyarakat merupakan unsur yang sangat dibutuhkan.

Pemberdayaan masyarakat di era global seperti saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar lagi. Masyarakat harus mampu berdaya untuk dapat tetap berdiri ditengah era global agar tidak ikut terseret pada arus globalisasi yang tidak

selalu berdampak positif. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk dapat memberikan dampak pada pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, masyarakat dipersiapkan untuk mampu ikut bersaing dengan negara-negara lain disegala aspek, terutama aspek ekonomi.

Pada hakekatnya pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memberikan kuasa dan kemampuan kepada masyarakat terutama kepada kelompok marjinal (Suhendra, 2006:104). Kuasa dan kemampuan yang diberikan kepada masyarakat diharapkan dapat menjadi modal dalam kegiatan pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah menurut Arsyad (2010:374) ialah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama mengelola setiap sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa dibutuhkannya partisipasi masyarakat, pemerintah dan sektor swasta guna menciptakan pembangunan ekonomi daerah.

Kebijakan yang sedang dimplementasikan pada setiap daerah di negara Indonesia saat ini ialah penggerakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peranan sektor UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional maupun daerah sangat penting guna memperbaiki ekonomi negara. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2011) menyatakan bahwa presentase UMKM di Indonesia mencapai 99,99% dan hanya 0,01% merupakan usaha besar. Data BPS (2013) menunjukkan bahwa sumbangan UMKM terhadap

PDB dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, begitupula dengan penyerapan tenaga kerjanya. Berdasarkan peran besar UMKM terhadap perekonomian nasional maupun daerah serta perannya dalam menyerap tenaga kerja tersebut membuat pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan perekonomian negara melalui pengembangan UMKM. Pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat dalam wadah UMKM. Pemerintah daerah memiliki tugas untuk mendampingi dan membantu masyarakatnya salah satunya yaitu membantu menemukan faktor kelemahan dan kekuatan dalam pengembangan potensi masyarakat, sehingga pembangunan UMKM dapat berdiri atas potensi yang dimiliki oleh masyarakat sendiri. Berikut dapat dilihat tabel perkembangan UMKM:

Tabel 1. Perkembangan UMKM Periode 2009-2013

No.	Indikator	Satuan	2009	2010	2011
1	Jumlah UMKM	Unit	52 764 603	53 823 732	55 206 444
2	Pertumbuhan Jumlah UMKM	Persen	2.64	2.01	2.57
3	Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Orang	96 211 332	99 401 775	101 722 458
4	Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Persen	2.33	3.32	2.33
5	Sumbangan PDB UMKM (Harga Konstan)	Rp. Miliar	1 212 599.30	1 282 571.80	1 369 326.00
6	Pertumbuhan Sumbangan PDB UMKM	Persen	4.02	5.77	6.76
7	Nilai Ekspor UMKM	Rp. Miliar	162 254.52	175 894.89	187 441.82
8	Pertumbuhan Nilai Ekspor UMKM	Persen	-8.85	8.41	6.56

No.	Indikator	Satuan	2012	2013
1	Jumlah UMKM	Unit	56 534 592	57 895 721
2	Pertumbuhan Jumlah UMKM	Persen	2.41	2.41
3	Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Orang	107 657 509	114 114 082

No.	Indikator	Satuan	2012	2013
4	Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Persen	5.83	6.03
5	Sumbangan PDB UMKM (Harga Konstan)	Rp. Miliar	1 451 260.20	1 536 918.80
6	Pertumbuhan Sumbangan PDB UMKM	Persen	6	5.89
7	Nilai Ekspor UMKM	Rp. Miliar	166 626.50	182 112.70
8	Pertumbuhan Nilai Ekspor UMKM	Persen	-11.1	9.29

Sumber: Badan Pusat Statistik UMKM Indonesia 2009-2013

Kota Kediri merupakan salah satu kota yang sedang giat membangun ekonomi daerahnya melalui pengembangan potensi daerah yang bergerak dalam UMKM. Kerajinan kemoceng bulu ayam Blabak merupakan salah satu UMKM yang masuk ke dalam produk unggulan Kota Kediri. Pemerintah Kelurahan Blabak telah menentukan fokus pengembangan produk unggulan di daerahnya, salah satunya ialah Lingkungan Bulerojo sebagai penghasil produk unggulan kemoceng bulu ayam (Kelurahan Blabak). Usaha kerajinan kemoceng bulu ayam Blabak ini telah lama berdiri yakni semenjak tahun 1990. Masyarakat sekitar telah terbiasa membuat kerajinan kemoceng turun menurun dari nenek moyang mereka.

Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Blabak dapat membuat kerajinan kemoceng dari bulu ayam. Dapat dijumpai toko – toko kecil di sekitrar kelurahan Blabak lingkungan Bulurejo yang menjual hasil kerajinan kemoceng tersebut. Kelurahan Blabak yang dijadikan pusat penghasil kemoceng bulu ayam tersebut, pada tahun 2011 menarik salah satu warga Swiss (Eropa) untuk melakukan kerjasama kurang lebih selama satu tahun hingga akhirnya terjadi krisis dan kerjasama tersebut harus terhenti dikartenakan mahalnnya biasanya impor. Penyediaan bahan baku kemoceng bulu ayam tersebut dilakukan dengan cara bekerjasama dengan warga sekitar untuk memenuhi permintaan pembeli.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja bekerjasama dengan pemerintah Kecamatan Pesantren membentuk kelompok usaha bersama (sentral) yang anggotanya terdiri dari masyarakat di Kelurahan Blabak yang berprofesi sebagai pengrajin kemoceng bulu ayam. Namun, kelompok tersebut sudah tidak berjalan. Tidak semua pengrajin kemoceng bulu ayam di Kelurahan Blabak memiliki SIUP dan TDP. Hingga kini, hanya terdapat satu pelaku usaha yang memiliki Surat Izin Usaha (SIUP) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang diberi nama UD Aneka Karya milik Bapak Slamet. UD Aneka Karya milik bapak Slamet merupakan UKM terbesar di Kelurahan Blabak dan merupakan pionir pengembang usaha kerajinan kemoceng di Kelurahan Blabak. UD tersebut menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Namun, ada pula masyarakat yang memproduksi kemoceng bulu ayam sendiri dan kemudian menjualnya sendiri.

Meskipun demikian, terdapat berbagai kendala dalam pemberdayaan UMKM. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, setiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Meskipun demikian, terdapat beberapa masalah utama yang umum untuk semua UMKM, yakni keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks, khususnya dalam pengurusan ijin usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan-peraturan dan

kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak jelas dan tak tentu arahnya (Tambunan, 2009:75). Primiana (2009:20) berpendapat bahwa salah satu masalah yang dihadapi oleh UMKM selain hal-hal tersebut di atas, yakni masalah manajemen. Manajemen menyangkut kegiatan pencatatan dan pelaporan kegiatan pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi menjadi sangat penting guna membantu masyarakat pengrajin kemoceng di kelurahan Blabak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui upaya pemberdayaan masyarakat pada UMKM Pengrajin Kemoceng Bulu Ayam Blabak untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga judul dari penelitian ini adalah “Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Pengrajin Kemoceng Bulu Ayam di Kelurahan Blabak Guna Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri)”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah masyarakat pengrajin kemoceng bulu ayam di Kelurahan Blabak Kota Kediri dalam meningkatkan pendapatan masyarakat?

2. Apakah faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan usaha kecil dan menengah masyarakat pengrajin kemoceng bulu ayam di Kelurahan Blabak Kota Kediri dalam meningkatkan pendapatan masyarakat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis upaya pemerintah dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah masyarakat pengrajin kemoceng bulu ayam di Kelurahan Blabak Kota Kediri yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha dan Tenaga Kerja dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan usaha kecil dan menengah pengrajin kemoceng bulu ayam di Kelurahan Blabak Kota Kediri dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi semua pihak yang berkepentingan. Secara umum kontribusi penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Kontribusi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana guna mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan. Selain itu, penelitian ini

diharapkan mampu memberikan masukan dan menambah wawasan bagi keilmuan administrasi publik, khususnya dalam pemberdayaan usaha kecil dan serta hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti dengan tema yang sama.

2. Kontribusi Praktis

Kontribusi praktis yang diharapkan dapat diberikan dari hasil penelitian ini ialah dapat memberikan informasi bagi pembaca pada umumnya dan bagi pemerintah pada khususnya, mengenai pemberdayaan masyarakat dan UMKM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang muncul dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan pendapatan masyarakat, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan tema skripsi yang penulis teliti.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi yang diperoleh dari penelitian baik secara akademis maupun praktis, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian tentang berbagai teori yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang diangkat sebagai acuan dalam membahas dan menganalisa permasalahan yang diangkat. Adapun teori yang digunakan adalah Teori Administrasi Pembangunan, Teori Pemberdayaan dan Teori Pembangunan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi hasil penelitian dan observasi penulis. Didalamnya menguraikan tentang hasil penelitian meliputi penyajian data mengenai gambaran umum lokasi dan situs penelitian, dan analisis data yang diperoleh selama penelitian dan merupakan jawaban dari pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah dan fokus. Kemudian akan dikaitkan dengan teori-teori yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dari penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan keseluruhan bab sebelumnya yang diuraikan mengenai hal-hal secara garis besar, sedangkan saran atau

rekomendasi berisikan masukan-masukan bagi instansi pemerintah terkait pemberdayaan masyarakat.